

NILAI STRATEGIS KEBERADAAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT DENGAN FASLABUH MEMADAI DI PESISIR SELATAN PULAU JAWA

Hendra Siregar

Pangkalan TNI AL Yogyakarta
<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i12.218>

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi DIY mendorong transformasi paradigma kelautan melalui visi "Menyongsong Abad Samudera Hindia." Akan tetapi, kawasan pesisir selatan Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi *surveillance gap* akibat keterbatasan Fasilitas Labuh (Faslabuh) TNI Angkatan Laut. Hal ini memicu kerentanan terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, aktivitas kapal riset asing tanpa izin, hingga kejahatan lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai strategis dan urgensi pembangunan Faslabuh TNI Angkatan Laut di pesisir selatan Jawa (khususnya wilayah kerja Lanal Yogyakarta) serta memetakan prioritas sinergi dengan Pelabuhan Perikanan Komersial berbasis infrastruktur penggunaan ganda (*dual-use infrastructure*). Menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan tiga kriteria utama: Keamanan & Penegakan Kedaulatan (KK), Infrastruktur & Lokasi Strategis (IL), serta Efektivitas Operasional Logistik (EO), diperoleh data bahwa kriteria Keamanan dan Penegakan Kedaulatan (KK) menjadi prioritas utama dengan bobot terbesar (53,9%), disikuti oleh Infrastruktur dan Lokasi Strategis (IL) (29,8%), serta Efektivitas Operasional Logistik (EO) (16,3%) dengan nilai *Consistency Ratio* (CR) sebesar 0,006 (< 10%/valid). Hasil sintesis menegaskan pentingnya pendekatan "*Hard Infrastructure First*", di mana penyediaan Faslabuh di lokasi strategis seperti Laguna Wediombo menjadi titik tumpu utama. Sinergi infrastruktur ganda (*dual-use*) antara TNI AL dan perikanan komersial mampu menekan efisiensi logistik patroli (KRI/PC), memperpanjang durasi operasi (*persistent presence*), serta mendorong pertumbuhan ekonomi nelayan lokal.

Kata Kunci: Pangkalan TNI AL, Faslabuh, Samudera Hindia, *Dual-Use Infrastructure*.

ABSTRACT

The Yogyakarta Provincial Government is promoting a maritime paradigm transformation through the vision "Welcoming the Indian Ocean Century." However, the southern coastal areas of Java, particularly the Special Region of Yogyakarta (DIY), face a surveillance gap due to limited Indonesian Navy Anchorage Facilities (Faslabuh). This creates vulnerability to Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, unauthorized foreign research vessel activity, and transnational crime. This study aims to analyze the strategic value and urgency of developing a Faslabuh TNI Navy on the southern coast of Java (specifically within the Yogyakarta Naval Base) and to map priorities for synergy with a Commercial Fishing Port based on dual-use infrastructure. Using the Analytical Hierarchy Process (AHP) with three main criteria: Security & Sovereignty Enforcement (KK), Infrastructure & Strategic Location

(IL), and Logistics Operational Effectiveness (EO), data obtained showed that the Security and Sovereignty Enforcement (KK) criteria were the top priority with the largest weight (53.9%), followed by Infrastructure and Strategic Location (IL) (29.8%), and Logistics Operational Effectiveness (EO) (16.3%), with a Consistency Ratio (CR) value of 0.006 (<10%/valid). The synthesis results emphasize the importance of a "Hard Infrastructure First" approach, where the provision of port facilities in strategic locations such as Wediombo Lagoon is the main focus. The synergy of dual-use infrastructure between the Indonesian Navy and commercial fisheries can reduce the efficiency of patrol logistics (KRI/PC), extend the duration of operations (persistent presence), and encourage the economic growth of local fishermen.

Keywords: Indonesian Navy Base, Faslabuh, Indian Ocean, Dual-Use Infrastructure.

PENDAHULUAN

Pesisir selatan Pulau Jawa secara historis sering kali dipandang sebagai halaman belakang dalam arsitektur pertahanan maritim Indonesia. Paradoks ini terjadi karena pusat pertumbuhan ekonomi, kepadatan jalur pelayaran domestik, dan konsentrasi pangkalan militer utama selama berdekade-dekade didominasi oleh kawasan pesisir utara Jawa yang menghadap ke Laut Jawa. Namun, dinamika geopolitik global abad ke-21 memaksa terjadinya pergeseran paradigma yang radikal. Samudera Hindia kini telah bertransformasi menjadi arena perebutan pengaruh (*the theater of geopolitical rivalry*) baru bagi kekuatan-kekuatan besar dunia (*great powers*), yang melibatkan aktivitas militer, eksplorasi sumber daya energi, hingga pengamanan jalur komunikasi laut internasional (*Sea Lines of Communications/SLOC*).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di bawah kepemimpinan Sinuhun Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sri Sultan)

menanggapi pergeseran global ini secara visioner melalui cetak biru pembangunan bertajuk "Menyongsong Abad Samudera Hindia." Visi luhur tersebut berupaya membalikkan orientasi pembangunan wilayah dari yang semula berbasis agraris-daratan (*among tani*) menjadi berbasis maritim-kelautan (*among dagang*). Orientasi baru ini bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat pesisir selatan melalui hilirisasi ekonomi kelautan. Kendati demikian, visi poros maritim lokal yang berdaya saing tinggi tidak akan dapat terwujud tanpa adanya jaminan stabilitas keamanan dan kedaulatan yang kokoh. Di sinilah keberadaan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) di pesisir selatan, khususnya Lanal Yogyakarta, menemukan momentum dan nilai strategisnya sebagai pilar penyangga utama bagi integrasi sistem pertahanan dan pembangunan ekonomi komersial nasional.

Bagi peneliti, Kawasan Samudera Hindia yang berbatasan langsung dengan

pesisir selatan Jawa merupakan zona perairan terbuka yang kaya akan komoditas perikanan bernilai tinggi, seperti ikan pelagis besar (tuna, cakalang, marlin), lobster, serta potensi energi bawah laut. Namun, minimnya fasilitas pangkalan militer dan infrastruktur pelabuhan yang memadai di sepanjang pantai selatan menciptakan ruang kosong pengawasan (*surveillance gap*). Ketiadaan Fasilitas Labuh (Faslabuh) TNI Angkatan Laut yang representatif di pesisir selatan mengakibatkan unsur-unsur KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) kesulitan melakukan proyeksi kekuatan (*force projection*), pengisian pembekalan ulang (logistik, air bersih, bahan bakar), maupun berlindung saat cuaca buruk melanda Samudera Hindia. Akibatnya, wilayah perairan ini menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk ancaman asimetris dan pelanggaran hukum laut internasional, mulai dari praktik pencurian ikan (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*), penyelundupan manusia (*human trafficking*), masuknya imigran gelap, hingga potensi infiltrasi kekuatan asing yang mengancam kedaulatan wilayah yurisdiksi nasional.

Atas kondisi ini, peneliti mencoba mengupas urgensi dan nilai strategis keberadaan faslabuh bagi TNI Angkatan Laut di pesisir selatan Pulau Jawa, bagaimana fasilitas ini dapat bersinergi dengan Pelabuhan Perikanan Komersial sehingga dapat turut mengoptimalkan

pembangunan ekonomi sekaligus pertahanan di wilayah pesisir selatan.

METODE

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kasus strategis. Dokumen ini mensintesis data sekunder yang berasal dari dokumen kebijakan pertahanan. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, kategorisasi geostrategis, dan tools AHP untuk memetakan kondisi strategis keberadaan pangkalan militer di pesisir selatan Pulau Jawa. Guna mempertajam penentuan skala prioritas penanganan masalah infrastruktur maritim, kajian ini mengadopsi prinsip hierarki struktural berbasis bobot kepentingan strategis guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pengambil keputusan di lingkungan TNI AL dan pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Secara makro-geopolitik, Samudera Hindia bukan lagi sekadar lautan yang tenang. Wilayah ini telah menjadi jalur perlintasan utama (*choke points*) dunia, seperti Selat Sunda dan Selat Lombok, yang digunakan oleh armada komersial maupun militer asing untuk bergerak dari Asia Timur menuju Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Keberadaan pangkalan militer asing, seperti Pangkalan Diego Garcia milik Amerika Serikat di tengah Samudera Hindia, menegaskan betapa tingginya nilai taktis kawasan lautan ini. Pesisir selatan

Pulau Jawa berada pada posisi garis depan (*frontline*) yang berhadapan langsung dengan dinamika tersebut.

Dalam doktrin Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), Pangkalan TNI Angkatan Laut di pesisir selatan Jawa, seperti Lanal Yogyakarta, memiliki peran vital sebagai unsur pengawas terdepan. Keberadaan pangkalan ini memotong jarak jangkauan operasional patroli maritim. Selama ini, kapal-kapal perang yang berpatroli di Samudera Hindia harus kembali ke pangkalan utama di Surabaya atau Jakarta hanya untuk melakukan bekal ulang. Dengan penguatan pangkalan di pesisir selatan, TNI AL dapat mempertahankan prinsip kehadiran konstan (*persistent presence*) di laut. Hal ini secara otomatis meningkatkan efek penangkal (*deterrence effect*) Indonesia terhadap potensi pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal asing, baik kapal survei hidrografi maupun kapal selam militer yang kerap melintas di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin.

Peneliti mencatat, terhadap tantangan keamanan dan pertahanan di pesisir selatan Pulau Jawa ditemukan beberapa fakta signifikan sebagai berikut:

a. Pelanggaran oleh Nelayan Asing di selatan Pulau Jawa. Sepanjang periode 2011 hingga 2025, Samudera Hindia di selatan Jawa kerap menjadi sasaran aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Wilayah ini, yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573. Nelayan asing, terutama dari negara-negara Asia Tenggara dan kapal trawl besar, kerap memasuki ZEE Indonesia untuk mengincar komoditas bernilai tinggi seperti Tuna dan Cakalang. Data menunjukkan bahwa meskipun patroli dilakukan, keterbatasan jarak jangkauan pangkalan menyebabkan celah pemantauan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan (KP) Paus melakukan penghentian dan pemeriksaan (Henrik) terhadap kapal ikan asing *Fishing Vessel* (FV) Yue Lu Yu 28359 (230 GT) berbendera China di perairan teritorial Indonesia selatan Jawa Timur yang secara politis tepat berada di sisi timur wilayah perairan Provinsi DIY pada Kamis 8 Mei 2025. (Humas Ditjen PSDKP, 2025)

b. Pelanggaran oleh Kapal Asing di selatan Pulau Jawa. Pelanggaran oleh kapal sipil maupun kapal riset asing terjadi dalam bentuk lintas laut yang tidak sesuai dengan ketentuan atau masuk ke perairan teritorial tanpa izin (*innocent passage* yang tidak memenuhi syarat). Beberapa kapal asing terdeteksi melakukan aktivitas "berhenti atau mondar-mandir" (*loitering*) di perairan selatan yang diduga melakukan pemetaan hidrografi bawah laut tanpa izin pemerintah RI. Hal ini sangat berisiko mengingat potensi sumber daya mineral dan kerentanan geologis bawah laut di selatan Jawa.



Gambar 1: Mapping Pergerakan Kapal Asing Menuju Samudera Hindia
Sumber: Laporan IOJI (2024 dan 2025)

Data pada gambar 1 menunjukkan bahwa kapal riset asing, khususnya kapal kelas *Bei Diao 996* dan *Yuan Wang 5*, melakukan manuver pelayaran dengan pola garis-garis ketat (*back and forth*) menuju Samudera Hindia. Pola ini mengindikasikan aktivitas potensi pemetaan terperinci terhadap medan bawah laut (*underwater terrain*). Situasi ini selain menjadi sinyal aktifitas riset ilmiah, hasilnya sangat krusial bagi operasional kapal selam dalam menavigasi celah laut dalam menuju selatan Jawa. Menjadi hal positif, kedua kapal tidak sampai keluar koridor alur laut internasional yang sudah ditetapkan karena TNI Angkatan Laut segera melakukan upaya pengawalan dan menggiring kapal kembali ke koridor (Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). (Damarjati, Danu, 2022)

c. Potensi Pelanggaran oleh Kapal Perang Asing di selatan Pulau Jawa.

Samudera Hindia merupakan jalur perlintasan strategis bagi armada tempur negara-negara besar dan regional, termasuk *Royal Australian Navy* (RAN) dan kapal-kapal perang negara lain yang menuju atau dari Pangkalan Diego Garcia. Meski saat ini belum ada catatan pelanggaran wilayah, potensi ini sangat dapat terjadi mengingat keberadaan *Her Majesty's Australian Ship (HMAS) Stirling* yang menjadi Pangkalan Utama Armada Barat mereka. Pangkalan ini terletak di pantai barat Australia, tepatnya di Pulau Garden. (Naval Technology, 2012) Menampung berbagai jenis kapal perang, termasuk enam kapal selam diesel-elektrik kelas Collins: HMAS Collins, Farncomb, Waller, Dechaineux, Sheean, dan Rankin.



Gambar 2: Kedudukan Pangkalan Diego Garcia
Sumber: Britanica.com (2025)

Pangkalan Diego Garcia, terletak di tengah Samudra Hindia, tepatnya di Kepulauan Cagos, berjarak sekitar 1553,456 Nautica Miles (NM) sebelah barat daya Pulau Sumatera. Pangkalan militer gabungan strategis Amerika Serikat dan Inggris ini berada di atol Kepulauan Chagos, Samudra Hindia. (Nothwood, 2006) Menjadi pangkalan basis operasi udara dan laut sejak 1970-an, menampung sekitar 2.500 staf, dan pernah digunakan untuk operasi militer di Timur Tengah. Keberadaan AUKUS menjadi potensi besar perjalanan antara Australia dan Diego Garcia melalui perairan yuridiksi Indonesia di selatan Pulau Jawa.

d. Aktifitas ilegal Aktor Non-Negara di selatan Pulau Jawa. Wilayah pesisir selatan Jawa, termasuk Provinsi DIY, teridentifikasi sebagai bagian jalur rawan bagi berbagai upaya penyelundupan, seperti narkoba hingga manusia (*people smuggling*) menuju Australia (Nainggolan,

Poltak Partogi, 2014). Aktor non-negara memanfaatkan karakteristik pantai yang sepi dan minim pengawasan untuk memberangkatkan imigran ilegal. Selain itu, potensi ancaman asimetris seperti narkoba lewat jalur laut dan aktivitas siber di selatan Jawa menjadi perhatian serius bersama.

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Secara prinsip, Pemerintah Provinsi DIY sangat mengharapkan keberadaan fasilitas labuh lengkap, khususnya sektor perikanan komersial di wilayah kerja mereka. Secara politik, Sri Sultan sekaligus Gubernur DIY secara tegas mendukung transformasi pesisir selatan menuju visi "Abad Samudera Hindia". Secara historis, Provinsi DIY menempati posisi yang unik dan sangat vital dalam peta geopolitik Indonesia. Sebagai satu-satunya provinsi yang tetap mempertahankan status Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, DIY

memiliki otonomi khusus yang memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan wilayah, termasuk pemanfaatan lahan untuk kepentingan pertahanan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta).

Di bawah kepemimpinan Sri Sultan, sebagai Gubernur DIY, region ini sedang melangkah menuju babak baru yang disebut sebagai "Abad Samudera Hindia" (Radar Jogja 2022). Visi agung ini bukan sekadar retorika pembangunan, melainkan sebuah transformasi paradigma dari masyarakat agraris-pesisir tradisional menjadi masyarakat maritim modern yang berdaya saing, berdaulat, dan sejahtera. Namun, visi besar tersebut memerlukan pondasi infrastruktur, keamanan dan pertahanan yang kokoh. Saat ini, garda terdepan yang paling siap dan berkomitmen untuk menjadi pilar penyangga visi tersebut adalah keberadaan Lanal Yogyakarta melalui pengembangan fasilitas labuh yang memadai.

Melihat kondisi kerawanan pertahanan dan keamanan yang ada, dihubungkan dengan visi Sri Sultan, peneliti melakukan sebuah analisis sebagai landasan pengambilan keputusan mengatasi permasalahan yang ada dengan penetapan prioritas permasalahan pengembangan sinergi Faslabuh dan Pelabuhan Perikanan Komersial secara

berdampingan, digunakan tools analisa AHP. Penggunaan metode ini merupakan langkah saintifik untuk menentukan urutan intervensi yang paling krusial.

a. Struktur Hierarki Permasalahan. Untuk menentukan prioritas optimalisasi Lanal Yogyakarta sebagai mitra pendukung pelabuhan perikanan komersial, ditetapkan hierarki tiga tingkat sebagai berikut:

1) Level 1 (Tujuan): Optimalisasi Sinergi Pelabuhan Perikanan Komersial dan Faslabuh TNI AL di DIY untuk mewujudkan Visi Abad Samudera Hindia.

2) Level 2 (Kriteria):

a) Kriteria A: Keamanan dan Penegakan Kedaulatan (KK). Fokus pada jaminan *Security of Sea Lines* (SOL) dan perlindungan aset pelabuhan dari ancaman asing/non-negara.

b) Kriteria B: Infrastruktur dan Lokasi Strategis (IL). Fokus pada penyediaan lokasi yang layak (hidro-oseanografi) dan fasilitas labuh ganda (*dual-use*).

c) Kriteria C: Efektivitas Operasional Logistik (EO). Fokus pada efisiensi rantai pasok hasil perikanan dan dukungan logistik kapal nelayan/komersial.

3) Level 3 (Alternatif Solusi):

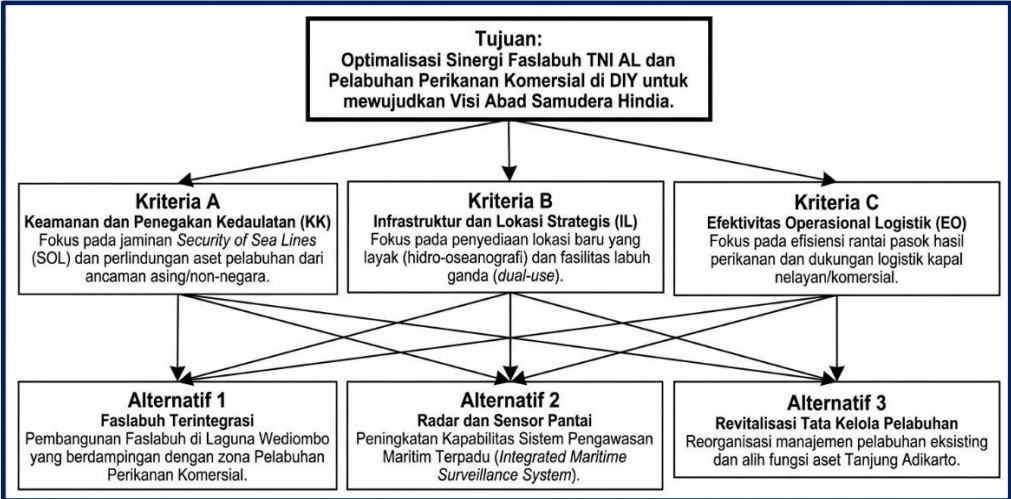
a) Faslabuh Terintegrasi. Pembangunan Faslabuh di Laguna Wediombo yang berdampingan

dengan zona Pelabuhan Perikanan Komersial.

b) Radar dan Sensor Pantai.
Peningkatan Kapabilitas Sistem Pengawasan Maritim Terpadu (*Integrated Maritime Surveillance*

System).

c) Revitalisasi Tata Kelola Pelabuhan. Reorganisasi manajemen pelabuhan eksisting (Aset Pelabuhan saat ini) dan dwifungsi.



Gambar 3: Struktur Hierarki Permasalahan
Sumber: Olahan Penyusun (2026)

b. Matriks Perbandingan Berpasangan (*Pairwise Comparison*)
Tingkat Kriteria. Berdasarkan data fakta mengenai urgensi ketiadaan Faslabuh

yang mampu melindungi aktivitas pelabuhan perikanan, dilakukan pembobotan kepentingan relatif antar kriteria.

Tabel 1: Pembobotan AHP

Kriteria	KK	IL	EO	Jumlah Baris	Bobot Prioritas (Eigenvector)
A. Keamanan & Kedaulatan (KK)	1	2	3	6	0,539 (53,9%)
B. Infrastruktur & Lokasi Strategis (IL)	0,5	1	2	3,5	0,298 (29,8%)
C. Efektivitas Operasional Logistik (EO)	0,33	0,5	1	1,83	0,163 (16,3%)
Jumlah Kolom	1,83	3,5	6	11,33	1,000 (100%)

Sumber: Olahan Penyusun (2026)

Berdasarkan hasil perhitungan yang tertuang pada **Tabel 1**, diperoleh matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar kriteria untuk

menentukan prioritas pengembangan sinergi Faslabuh TNI AL dan Pelabuhan Perikanan Komersial di Provinsi DIY. Berikut adalah uraian mendalam mengenai

makna setiap bobot prioritas tersebut:

1) Prioritas Utama, Keamanan dan Penegakan Kedaulatan (53,9%). Kriteria **Keamanan dan Penegakan Kedaulatan (KK)** menempati urutan pertama dan menjadi prioritas utama dengan bobot sebesar **0,539 (53,9%)**.

- **Alasan Strategis:** Keberadaan pelabuhan perikanan komersial baru akan lebih menarik investor dan memberdayakan nelayan jika terjaminnya *Security of Sea Lines* (SOL). Data fakta mengenai aktivitas kapal asing (IUU Fishing dan kapal riset) di selatan Jawa menuntut kehadiran Faslabuh TNI AL sebagai penyedia jasa keamanan publik (*public security goods*).

- **Implikasi:** Kehadiran TNI AL melalui Faslabuh di Wediombo berfungsi sebagai *deterrent effect* (efek gentar) terhadap pelaku kejahatan lintas negara. Bobot ini menunjukkan bahwa investasi keamanan adalah pendukung nilai ekonomis pelabuhan; semakin aman jalur pelayaran, semakin tinggi kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekspor ikan segar ke mancanegara.

2) Prioritas Kedua, Infrastruktur dan Lokasi Strategis (29,8%). Kriteria **Infrastruktur dan Lokasi Strategis (IL)** menempati urutan kedua dengan bobot prioritas

sebesar **0,298 (29,8%)**. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor fisik (infrastruktur) dan geografis merupakan variabel krusial dalam keberhasilan visi "Abad Samudera Hindia".

- **Alasan Strategis:** Identifikasi dan pembangunan infrastruktur di lokasi yang superior menjadi bagian prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*).

- **Implikasi:** Bobot ini menegaskan bahwa pemerintah daerah dan TNI AL sebaiknya memprioritaskan alokasi sumber daya masif untuk konstruksi Faslabuh yang mampu melayani kapal perang (KRI) berdampingan dengan dermaga untuk Pelabuhan Perikanan Komersial. Infrastruktur fisik ini, aspek pertahanan, keamanan dan logistik akan berjalan efektif bagi perkuatan ketiganya.

3) Prioritas Ketiga: Efektivitas Operasional Logistik (16,3%). Kriteria **Efektivitas Operasional Logistik (EO)** menempati posisi ketiga dengan bobot sebesar **0,163 (16,3%)**.

- **Alasan Strategis:** Meskipun efisiensi rantai pasok (*supply chain efficiency*) dan (*cold chain*) sangat penting bagi komoditas perikanan, efektivitas operasional ini bersifat turunan (*downstream effect*). Artinya, logistik yang efisien hanya dapat dicapai apabila infrastruktur

fisiknya sudah terbangun (Prioritas IL) dan jalurnya sudah diamankan (Prioritas KK).

- **Implikasi:** Peningkatan kapabilitas logistik, seperti penyediaan fasilitas *cold storage* berdampingan dengan terminal BBM, adalah hasil akhir dari dua prioritas utama sebelumnya. Bobot yang lebih rendah bukan berarti tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa langkah ini akan otomatis terdongkrak keberhasilannya setelah dua kriteria di atas terpenuhi.

Urutan prioritas ini secara matematis dan strategis menunjukkan bahwa pendekatan "**Hard Infrastructure First**" (Memulai dari pembangunan fisik Faslabuh) adalah jalan terbaik. Sinergi antara Perlindungan Militer (KK), Ketangguhan Fisik (IL), dan Efisiensi Ekonomi (EO) inilah yang akan mewujudkan impian Sri Sultan tentang pemberdayaan kawasan selatan yang berdaulat dan sejahtera.

c. Uji Konsistensi.

Untuk memastikan hasil pembobotan memiliki dasar logika yang kuat, dilakukan uji konsistensi:

- 1) Titik Keseimbangan. Total keseimbangan dihitung mendekati jumlah kriteria (3), menunjukkan keseimbangan penilaian.

- 2) Indeks Konsistensi (CI). $CI = 0,0035$ (nilai sangat kecil/mendekati nol).

- 3) Rasio Konsistensi (CR). $CR = 0,006$ (0,6%). Karena $CR < 10\%$, maka pembobotan dinyatakan Valid, Konsisten, dan Sangat Reliabel.

d. Penjabaran Hasil Prioritas.

Berdasarkan perhitungan AHP, urutan prioritas permasalahan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Prioritas Utama: Penguatan Keamanan dan Penegakan Kedaulatan (53,9%). Setelah infrastruktur fisik Faslabuh tersedia, penguatan sistem pengawasan radar pantai dan sensor bawah air diperlukan untuk menjamin keamanan aset Faslabuh TNI AL sekaligus Pelabuhan Perikanan Komersial dari IUU Fishing dan ancaman lainnya.

- 2) Prioritas Kedua: Penyediaan Infrastruktur di Lokasi Strategis (29,8%). Infrastruktur Faslabuh jika tidak berada di Lokasi strategis, akan membuat keberadaannya tidak dapat berfungsi secara optimal. Pemecahan masalah prioritas utama dan kedua merupakan satu kesatuan integral. Atas kondisi ini, Komandan Lanal Yogyakarta mengusulkan kiranya Sri Sultan sekaligus Gubernur DIY berkenan memberikan mandat untuk pemanfaatan Laguna Wediombo,

sebagai Lokasi pembangunan Faslabuh TNI AL. Lokasi tidak strategis dapat menjadi variabel penghambat dominan di masa mendatang.

3) Prioritas Ketiga: Peningkatan Efektivitas Operasional Logistik (16,3%). Efisiensi logistik ekspor-impor ikan segar akan meningkat secara signifikan setelah kedua prioritas di atas terpenuhi, memutuskan ketergantungan pada pangkalan/logistik luar daerah.

e. Sintesis Analisa.

Melalui pendekatan AHP, dapat disampaikan bahwa sinergi Pelabuhan Perikanan Komersial dan Faslabuh TNI AL tidak dapat dilakukan secara parsial. Keunggulan bobot pada kriteria Keamanan dan pertahanan yang didukung infrastruktur memadai dan lokasi strategis sebagai **center of gravity** atau titik tumpu utama pemberdayaan pesisir Selatan Provinsi DIY. Untuk itu, jika Sri Sultan sekaligus Gubernur DIY berkenan, maka Faslabuh TNI Angkatan Laut akan menjadi fondasi kokoh menuju visi **Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**.

Sinergi Fasilitas Labuh Militer dan Pelabuhan Perikanan Komersial (Dual-Use Infrastructure). Salah satu solusi inovatif dan efisien dalam mengatasi keterbatasan anggaran pertahanan adalah dengan menerapkan konsep infrastruktur penggunaan ganda (*dual-use*

infrastructure). Konsep ini mengintegrasikan pembangunan Pelabuhan Perikanan Komersial modern dengan Faslabuh TNI Angkatan Laut di satu kawasan strategis, seperti potensi pemanfaatan kawasan Laguna Wediombo atau titik potensial lain di sepanjang pesisir selatan Yogyakarta.

Integrasi ini membawa keuntungan timbal balik yang masif bagi aspek pertahanan dan ekonomi:

- **Aspek Pertahanan Matra Laut:** Adanya fasilitas labuh dengan draf dermaga yang memadai dan terlindung dari ombak besar khas samudera memungkinkan kapal-kapal patroli cepat TNI AL (khususnya kelas KCR dan PC) serta kapal Bakamla untuk bersandar dengan aman. TNI AL dapat memanfaatkan infrastruktur pengisian bahan bakar, ketersediaan air bersih, dan logistik yang terintegrasi di pelabuhan komersial tersebut untuk memperpanjang durasi operasi di laut.

- **Aspek Ekonomi Komersial:** Pembangunan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan dermaga yang dalam, pemecah gelombang (*breakwater*) yang kokoh, gudang pendingin (*cold storage*), dan fasilitas pelelangan ikan modern akan memicu pertumbuhan industri perikanan skala besar. Nelayan lokal yang semula hanya menggunakan perahu motor kecil dapat beralih menggunakan kapal dengan bobot di atas 30 GT untuk mengeksploitasi potensi ikan tuna di laut dalam Samudera Hindia.

Sinergi lambung abu-abu (TNI Angkatan Laut) dan lambung putih/sipil (Nelayan dan Penegak Hukum Sipil) di pesisir selatan menciptakan mata dan telinga bagi intelijen maritim. Nelayan komersial dapat bertindak sebagai komponen cadangan yang memberikan informasi deteksi dini jika melihat aktivitas mencurigakan di tengah laut, sementara TNI Angkatan Laut memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan keamanan bagi para nelayan dari intimidasi aktor luar.

PENUTUP

Keberadaan Pangkalan TNI Angkatan Laut yang memiliki faslabuh memadai di pesisir selatan Pulau Jawa, khususnya Lanal Yogyakarta, memiliki nilai strategis yang multidimensional. Pangkalan ini bertindak sebagai garda depan pengamanan garis pantai nasional yang berhadapan langsung dengan dinamika geopolitik Samudera Hindia. Pengembangan Lanal melalui pembangunan Faslabuh yang terintegrasi dengan Pelabuhan Perikanan Komersial merupakan langkah maju yang menyatukan kepentingan pertahanan negara (*security*) dengan kemakmuran ekonomi masyarakat (*prosperity*). Melalui konsep infrastruktur penggunaan ganda (*dual-use*), TNI AL dapat mengoptimalkan efisiensi logistik operasi patroli laut, memperkuat efek penangkal, sekaligus mewujudkan transformasi paradigma maritim yang berdaulat di selatan Jawa.

Rekomendasi Kebijakan

1. **Percepatan Studi Kelayakan Komprehensif:** TNI AL melalui Dinas Fasilitas Pangkalan (Disfaslanal) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu segera melakukan studi kelayakan hidrografi, oseanografi, dan teknik sipil untuk menentukan titik koordinat terbaik bagi pembangunan pelabuhan penggunaan ganda di pesisir selatan Jawa.
2. **Formulasi Regulasi Sinergi Lintas Sektor:** Pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan nota kesepahaman (MoU) yang mengatur tata kelola, pembagian wewenang operasional, dan pemeliharaan infrastruktur bersama antara pihak pelabuhan perikanan sipil, Bakamla, dan TNI AL.
3. **Peningkatan Postur dan Kesiapsiagaan Intelijen:** Sembari menunggu pembangunan fisik dermaga, Lanal Yogyakarta harus dioptimalkan dalam penguatan pos-pos pengamatan TNI AL (Posal) berbasis teknologi radar pesisir dan penguasaan jaringan informasi berbasis komunitas nelayan lokal sebagai instrumen deteksi dini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, A.H., Suhartini, S. (2023). Analisis SWOT dan AHP untuk Menentukan Strategi Pengembangan Dalam Persaingan Usaha (Studi Kasus: UD. Duta Sumber Ayem Niaga). *Journal of Research and Technology* 9(2): 211–220.
- Damarjati, D. (2022). IOJI Paparkan

- Dugaan Pelanggaran Kapal-kapal Asing di Wilayah RI. Deti.com, 22 November 2024, Diakses 3 Mei 2026.
- Humas Ditjen PSDKP, (2025). KKP Tangkap Kapal Ikan Asing Berbendera China. Kkp.go.id, 12 Mei 2025. Diakses 3 Mei 2026.
- Joeliherman, J. (2025). Pertahanan Litoral Dihadapkan Pada Keberadaan Alki Yang Membelah Di Tengah Gugus Kepulauan Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia* 13(1): 86 – 102.
- Putri, T.M., Andalia, C.I. (2026). Analisis Strategi Uni Eropa Dalam Melakukan Kerjasama Energi Translantik Dengan Amerika Serikat Melalui Inisiatif Repowereu 2022-2024. *Jurnal Penstudi Hubungan Internasional* 3(1): 33-41.
- Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., William Behrens III, W. (1972). *The Limits to Growth*. Washington DC: Potomac Associates Book.
- Munawaroh, N. (2015). Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. *JDIH Kabupaten Sukoharjo*, Diakses 2 Juli 2026.
- Nainggolan, P.P. (2014). Masalah Krusial Di Kabupaten Kepulauan Terluar Rote Ndao. *Jurnal Penelitian Politik* 11(1): 59–77.
- Naskah Seminar Nasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2015). *Finding The Fifth Element*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Naval Technology (2012). HMAS Stirling Naval Base, Garden Island. *naval-technology.com*. 18 Maret 2022, diakses 3 Mei 2026.
- Nothwood (2006). Overseas Bases, Diego Garcia. *Northwood.mod.uk*, 21 September 2006, diakses 3 Mei 2026.
- Radar Jogja (2022). Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. *Radaryogja.com*, 10 Agustus 2022, diakses 2 Mei 2026.
- Sahubawa, L., Khakim, N., Lasindrang, (2015). Kajian Sebaran Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Di Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Upaya Percepatan Investasi. *Jurnal Teknosains* 4(2): 101-120.
- Wardani, N.K. (2016). Tentara Laut Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1950). *Mozaik Sejarah* 1(4): 1-18.

Aturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014, Kementerian Pertahanan RI.